

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dari kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Sumber pembiayaan yang penting bagi Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan sesuai prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang nyata adalah suatu prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal keuangan. Adapun sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membiayai kebutuhan belanja modal daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006)

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut 2 aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya yang terdiri dari :

- a. Analisis penerimaan yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber- sumber pendapatan yang potensial dan biaya- biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b. Analisis pengeluaran yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya- biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor yang menyebabkan biaya tersebut meningkat.

Setiap unit pemerintah harus menyusun laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim biasanya ditujukan untuk pengendalian operasi oleh manajemen atau pengawasan oleh badan legislative. Sedangkan laporan keuangan tahunan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pihak luar.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2006) Hasil analisis diperoleh bahwa secara parsial DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, seraca Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Penelitian yang dilakukan oleh Irsyadi (2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan sisa lebih

perhitungan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji t sebagai berikut DAU diperoleh t-hitung sebesar 3,021. DAK diperoleh t-hitung sebesar -0,682, PAD diperoleh t-hitung sebesar 7,401 dan Silpa diperoleh t-hitung sebesar 4,748. Dari hasil ini membuktikan bahwa besarnya thitung terletak di daerah penolakan  $H_0$  yaitu thitung lebih besar dari t tabel atau  $4,748 > 2,00$ .  $H_1$  diterima di daerah antara  $-2,00 < t \text{ hitung} < 2,00$ . dan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal ini dibuktikan dari hasil analisis uji F uji F diperoleh sebesar 50,159. Ternyata besarnya Fhit terletak di daerah penolakan  $H_0$ , yaitu Fhit lebih besar dari Ftabel atau  $50,159 > 2,53$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,770, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model DAU (X1), DAK (X2), PAD (X3), Silpa (X4), menjelaskan variasi Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebesar 77,0% dan 23% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SiLPA pada belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Belanja pegawai berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap alokasi belanja modal. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.2. Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka Batasan masalah sebagai berikut ini:

1. Obyek penelitian ini hanya mencakup kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur.
2. Variabel ini hanya terbatas 4 variabel bebas yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan 1 variabel terikat yaitu Belanja Modal.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana pengaruh variabel DAK terhadap Belanja Modal?
4. Bagaimana pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal.
2. Menguji pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal.
3. Menguji pengaruh variabel DAK terhadap Belanja Modal.
4. Menguji pengaruh variabel DBH terhadap Belanja Modal.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Bagi penulis : Sebagai penambahan pengetahuan khususnya mengenai keuangan daerah.

Bagi Pembaca : Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

